

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Menurut Undang-undang no. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Menurut Kemenkumham (2009), karakteristik perusahaan tambang secara umum terdapat empat kegiatan usaha pokok. Pertama, eksplorasi (*exploration*) yaitu usaha dalam rangka mencari, menemukan, dan mengevaluasi suatu wilayah tambang dalam jangka waktu tertentu seperti yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku. Kedua, pengembangan dan konstruksi (*development and construction*) yaitu setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan bahan galian sampai siap diproduksi secara komersial. Konstruksi adalah pembangunan fasilitas dan prasarana untuk melaksanakan dan mendukung kegiatan produksi. Ketiga, produksi (*production*) yaitu semua kegiatan mulai dari pengangkutan bahan galian ke permukaan bumi sampai siap untuk dipasarkan, dimanfaatkan, atau diolah lebih lanjut. Keempat, dengan adanya pengolahan kegiatan penambangan pada suatu daerah tertentu, maka akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup di sekitar lokasi penambangan. Dampak yang terjadi terhadap lingkungan hidup yang berada di sekitar lokasi penambangan meliputi meningkatnya ancaman tanah longsor, gerakan massa tanah, pengikisan tanah pucuk dan menghilangnya vegetasi akibat kegiatan penggalian bahan tambang. Dalam PSAK 33 mengenai akuntansi pertambangan, menyebutkan bahwa kegiatan eksplorasi pertambangan mengeluarkan biaya yang besar dan membutuhkan biaya investasi yang relatif sangat besar, padat modal, berjangka

panjang, sarat risiko, dan membutuhkan teknologi yang tinggi, sehingga diperlukan pengelolaan yang benar-benar profesional.

Pertambangan menjadi salah satu dari 2 (dua) Sektor Utama yaitu, industri penghasil bahan baku atau industri pengelola sumber daya alam, dengan 42 perusahaan *go public*. Sektor Pertambangan terdiri dari 4 (empat) subsektor, yaitu: Pertambangan Batubara; Pertambangan Minyak dan Gas Bumi; Pertambangan Logam dan Mineral lainnya; dan Pertambangan Batu-batuan.

Sampai tahun 2010, Indonesia masih menjadi salah satu produsen besar di dunia untuk berbagai komoditas pertambangan. Antara lain timah (produsen terbesar kedua di dunia), nikel (cadangan terbesar ke empat di dunia) dan bauksit (cadangan terbesar ke tujuh di dunia). Begitu juga dengan komoditas unggulan lainnya seperti besi baja, emas, perak dan tembaga. Indonesia juga memiliki cadangan energi yang sangat besar seperti misalnya batubara, panas bumi, gas alam, dan air yang sebagian besar dimanfaatkan untuk mendukung industri andalan seperti tekstil, perkapalan, peralatan transportasi dan makanan-minuman ([www.minerba.esdm.go.id](http://www.minerba.esdm.go.id)).

Menurut Marta (2017) tahun 2016 pun makin memperpanjang tren penurunan ekspor Indonesia yang terjadi sejak 2012. Artinya, sudah lima tahun berturut-turut, ekspor Indonesia terus menurun atau tumbuh negatif. Faktor eksternal antara lain lesunya perekonomian global dan jatuhnya harga komoditas. Lesunya perekonomian global menyebabkan transaksi perdagangan dunia menurun. Akibatnya, permintaan barang dari Indonesia juga menyusut. Selain dampak perlambatan ekonomi global, faktor lainnya yaitu kebijakan mengenai Undang-Undang Mineral dan Batubara No. 4 Tahun 2009 yang mulai berlaku 12 Januari Tahun 2014 tentang pemerintah menetapkan larangan ekspor mineral mentah yang menyebabkan tidak sedikitnya perusahaan yang mengalami dampak dari regulasi tersebut.

**Tabel 1.1**  
**Berat Bersih dan Nilai Ekspor Hasil Pertambangan**  
**Tahun 2012-2016**

| Tahun | Berat Bersih (ribu ton) | Nilai (juta US\$) | % perubahan nilai |
|-------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 2010  | 359,915.50              | 26,708.00         | 35.64             |
| 2011  | 456,926.20              | 34,637.70         | 29.69             |
| 2012  | 483,700.40              | 31,322.90         | -9.57             |
| 2013  | 581,522.00              | 31,154.30         | -0.54             |
| 2014  | 428,882.90              | 22,827.70         | -26.73            |
| 2015  | 381,931.10              | 19,456.00         | -14.77            |
| 2016  | 387,496.10              | 18,164.80         | -6.64             |

Sumber: *www.bps.go.id*

Tabel 1.1 menunjukkan ekspor hasil pertambangan Indonesia mengalami pertumbuhan yang negatif dari tahun 2010-2016. Hal tersebut akan berpengaruh pada pendapatan dan laba perusahaan, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sehingga akan berdampak pada kesulitan keuangan perusahaan (*financial distress*). Namun, menurut Sinadi (2015) industri pertambangan dan jasa pertambangan merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional.

## 1.2 Latar Belakang Penelitian

Pada hakikatnya, perusahaan didirikan untuk menghasilkan keuntungan dan juga eksistensi jangka panjang yang berkembang serta tidak mengalami kebangkrutan. Namun terkadang harapan tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan. Tidak stabilnya keadaan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan kesulitan keuangan perusahaan hingga sulit mempertahankan eksistensi. Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia yang semakin maju, memaksa perusahaan untuk selalu berinovasi dan melakukan ekspansi usaha agar dapat bertahan dalam persaingan. Berikut hal-hal yang menjelaskan tentang keadaan sektor pertambangan.

Andriyanto (2015) menjelaskan bahwa alasan anjloknya harga minyak yang terjadi pada tahun 2014 adalah melimpahnya pasokan minyak di pasar dunia yang disebabkan antara lain karena Amerika Serikat dan Kanada telah meningkatkan

produksi minyak mereka, berkat teknologi *fracking* yang memungkinkan perusahaan-perusahaan pengeboran mencapai endapan minyak yang sebelumnya tidak terjangkau. Produksi minyak AS mencapai 9 juta barel per hari, tingkat tertinggi dalam lebih dari 30 tahun. Melambannya pertumbuhan ekonomi di Tiongkok sebagai konsumen energi terbesar di dunia terjadi pada waktu yang bersamaan. Hal tersebut berdampak ke perusahaan-perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia. Menurut Sewandarijatun (2014), hal lain yang menyebabkan perusahaan pertambangan mengalami kesulitan keuangan yaitu dikarenakan adanya Undang-undang Mineral dan Batubara No. 4 tahun 2009 yang mulai berlaku 12 Januari 2014 mengenai Peraturan tersebut berisikan tentang pemerintah menetapkan larangan ekspor bahan mentah, hal tersebut dapat menyebabkan turunnya pendapatan perusahaan yang akan berimbas terjadinya pengangguran atau PHK bagi pekerja di sektor pertambangan yang bisa mencapai ratusan ribu tenaga kerja.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi memberikan dampak yang kurang mengembirakan pada kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan. Tingkat pengangguran sedikit meningkat yang disertai dengan menurunnya elastisitas penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan berlanjutnya penurunan harga komoditas pada tahun 2015 mendorong penurunan kinerja ekspor Indonesia. Dengan komposisi ekspor Indonesia yang masih didominasi sumber daya alam, penurunan harga komoditas global mendorong kontraksi ekspor terutama yang berbasis komoditas seperti pertambangan, dengan penurunan paling tajam terjadi pada batubara. Pelemahan ekspor terlihat dari penurunan ekspor ke salah satu mitra dagang utama, yakni Tiongkok, yang lebih rendah hampir 20% dibanding tahun sebelumnya ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Industri pertambangan dan jasa pertambangan yang merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional, tidak sejalan dengan keadaan saat ini yaitu penurunan pertumbuhan ekspor dan harga komoditi dalam beberapa tahun terakhir yang menyebabkan perusahaan pertambangan terkena dampaknya (Sinadia, 2015). Hal tersebut dikarenakan perekonomian global yang sedang melemah menjadi

penyebab berkurangnya permintaan dan mempengaruhi penurunan harga komoditas dunia yang berakibat pada penurunan laba yang diperoleh perusahaan pertambangan dalam beberapa tahun belakangan ini.

*Financial distress* pada perusahaan ditandai dengan hal-hal berikut ini, yaitu pertama, menurut Platt dan Platt dalam Ayu, dkk. (2017), *financial distress* diartikan sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum kebangkrutan. Selanjutnya menurut Hapsari (2012), *financial distress* adalah situasi dimana arus kas operasi perusahaan tidak memadai untuk melunasi kewajiban-kewajiban lancar (seperti hutang dagang atau beban bunga) dan perusahaan terpaksa melakukan tindakan perbaikan demi kelangsungan hidup perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya dapat diukur dengan *interest coverage ratio* (ICR) (Mustakawarman, 2016). Ketiga, Whitaker dalam Anggraini (2015) mengemukakan bahwa perusahaan dikatakan mengalami *financial distress* jika beberapa tahun mengalami laba bersih (*net income*) negatif, juga melakukan pengurangan bahkan tidak membayarkan dividennya. Pendapat yang dikemukakan oleh Fahmi (2011:158) salah satu indikasi dari *financial distress* adalah dilakukannya pemutusan hubungan kerja (PHK) ataupun pensiun dini. Hadi (2014) mengatakan bahwa kondisi *financial distress* perusahaan harus diketahui sejak dini sehingga dapat dilakukan tindakan tindakan untuk mengantisipasi kondisi yang mengarah pada kebangkrutan.

Menurut Purwanto (2013), penurunan kinerja keuangan yang terjadi pada perusahaan pertambangan jika terjadi terus menerus maka akan berdampak pada kebangkrutan. PT. Bumi Resources Tbk. (BUMI) merupakan perusahaan tambang di Indonesia yang mengalami kerugian yang paling menonjol dibandingkan perusahaan pertambangan lain yang terdaftar di BEI. Pada tahun 2011 BUMI masih mengalami keuntungan. Kerugian yang dialami BUMI tahun 2012 disebabkan perusahaan mengalami penurunan pendapatan menjadi 3,77 miliar dollar AS, turun 8,1 persen dari tahun sebelumnya yaitu 4 miliar dollar AS. Dari segi utang, perseroan juga mencatatkan kenaikan dari 6,34 miliar dollar AS menjadi 6,92 miliar dollar AS. Utang tersebut terdiri dari utang jangka pendek 2,55 miliar dollar AS dan utang jangka panjang 2,4 miliar dollar AS. Pada sisi ekuitas mengalami

penurunan drastis dari semula 1,12 miliar dollar AS menjadi hanya 392,14 juta dollar AS. Laba per saham perseroan juga anjlok dari semula untung 9,46 dollar AS menjadi rugi 32,85 dollar AS per saham.

Fenomena mengenai *financial distress* lainnya menurut Aliya (2015) menyatakan pada tahun 2016 PT Berau Coal Energy Tbk. (BRAU) juga mengalami kerugian. Kerugian ini disebabkan karena pasar batu bara semakin menyusut setelah China membatasi impor batu bara seiring melemahnya pertumbuhan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara di negara itu. India pun ikut membatasi impor batubara lantaran rupee melemah. Lembaga pemeringkat *Moody's Investor Service* menurunkan prospek peringkat utang BRAU dari stabil menjadi negatif. Penurunan peringkat termasuk surat utang yang diterbitkan BRAU dan Berau Capital Resources Pte Ltd. Pelemahan permintaan sektor tambang disebabkan oleh adanya berbagai regulasi di negara-negara yang ada terkait permintaan impor. Adanya penekanan permintaan membuat permintaan barang komoditas hasil tambang di Indonesia pun ikut berkurang, seperti kebijakan-kebijakan negara China dan India yang mengurangi impor batu bara. Kerana hal tersebut BRAU gagal bayar utang 450 juta dolar AS yang jatuh tempo 8 Juli 2016 dan 500 juta dolar AS di 13 Maret 2017 akan direstrukturisasi jadi surat utang baru yang jatuh tempo 31 Juli 2019 dan 31 Desember 2020.

Menurut Hamdani (2017), menyatakan salah satu perusahaan yang tidak mampu membagikan deviden yaitu PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS). BRMS, dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) dan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS-LB) memutuskan tak membagikan deviden. Komisaris Utama BRMS, Ari S. Hudaya mengatakan bahwa tak dibagikannya deviden terhadap pemegang saham karena perusahaan mengalami kerugian. Pada tahun buku 2016 pembagian deviden dari hasil laba tidak diusulkan karena perusahaan masih mengalami kerugian. Ketika perusahaan tidak mampu membagikan deviden karena mengalami kerugian, hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan.

Tabel 1.2 menggambarkan kinerja perusahaan-perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016 dari nilai

laba atau rugi masing-masing perusahaan. Kerugian dalam beberapa tahun juga merupakan indikasi dari keadaan *financial distress*, hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan bahwa laba perusahaan pertambangan cenderung mengalami penurunan bahkan ada yang mengalami kerugian. Tahun 2015 menjadi puncak penurunan banyaknya perusahaan yang mengalami laba negatif dalam 5 (lima) tahun terakhir.

**Tabel 1.2**  
**Nilai *Net Income* Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di**  
**BEI tahun 2012-2016 (Disajikan dalam jutaan rupiah)**

|      | 2012       | 2013       | 2014       | 2015        | 2016      |
|------|------------|------------|------------|-------------|-----------|
| ARII | -108,355   | -130,156   | -307,774   | -359,382    | -344,083  |
| BUMI | -6,857,273 | -8,086,267 | -5,824,740 | -30,299,501 | 1,623,812 |
| BYAN | 533,974    | -676,396   | -2,363,093 | -1,134,048  | 243,262   |
| DEWA | -398,714   | -633,866   | 3,733      | 6,547       | 7,425     |
| HRUM | 1,571,110  | 607,356    | 32,579     | -263,372    | 242,780   |
| PTRO | 477,367    | 212,023    | 28,167     | -175,948    | -105,660  |
| ANTM | 2,993,115  | 409,947    | -775,286   | -1,440,852  | 64,806    |
| CITA | 236,313    | 686,686    | -384,699   | -341,205    | -265,247  |
| CKRA | -3,957,879 | 257        | -318,924   | -54,627     | -54,179   |
| DKFT | 303,447    | 337,286    | -46,208    | -32,644     | -87,161   |
| PSAB | 853,918    | -322,473   | 323,523    | 433,553     | 300,409   |
| SMRU | -65,715    | -45,548    | -34,905    | -270,299    | -226,795  |

(Sumber: Laporan Keuangan Tahunan [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id))

Djumena (2015) mengatakan bahwa sebanyak 125 perusahaan pertambangan di Kalimantan Timur tidak beroperasi pada tahun 2015 dikarenakan beberapa faktor yaitu lesunya perekonomian dunia, turunnya harga minyak mentah, minimnya permintaan akan komoditas batu bara yang diikuti penurunan harga yang menyebabkan berkurangnya pendapatan yang diperoleh perusahaan. Akibat tidak beroperasinya perusahaan, banyak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 5.000 orang. Pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran menurut Fahmi (2008:158) merupakan kondisi *financial distress* yang cukup riskan mendekati kebangkrutan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas penulis mengasumsikan bahwa permasalahan ekonomi yang terjadi seperti krisis ekonomi

global, anjloknya komoditas ekspor, dan melemahnya permintaan pasar mengakibatkan permasalahan bagi perusahaan. Biaya tinggi yang telah dikeluarkan perusahaan guna menghasilkan produknya akan berakibat pada meningkatnya biaya produksi, dan krisis ekonomi global membuat dampak yang besar, dimana salah satu perusahaan besar mengalami penurunan kinerja maka akan berimbas kepada perusahaan sejenis lainnya dan membuat perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan bahkan hingga kebangkrutan. Semakin melemahnya harga komoditas dan juga penurunan permintaan dari Tiongkok (Cina) yang menjadi konsumen terbesar Indonesia, penerimaan Indonesia atas hasil ekspor produk pertambangan pun berkurang.

Kinerja keuangan dan mekanisme *good corporate governance* yang kurang baik menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. *Financial distress* dapat dipengaruhi oleh kinerja keuangan dan mekanisme *good corporate governance*. Menurut Kasmir (2012:104) secara umum kinerja keuangan dapat diukur menggunakan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, rasio pertumbuhan dan rasio penilaian. Menurut Bringham dan Houston dalam Wahyuningsih (2017), rasio keuangan dirancang untuk membantu kita mengevaluasi laporan keuangan. Rasio-rasio keuangan sering kali digunakan untuk memprediksi kondisi *financial distress* pada suatu perusahaan, yang mana dapat dilihat di dalam laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan.

OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) menyatakan bahwa *corporate governance* adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. Sutojo, (2015:2) *corporate governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota *stakeholders* non-pemegang saham. Ardhanareswari (2014), mengemukakan bahwa masih rendahnya penerapan *good corporate governance* di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, yaitu berada di peringkat kedua terbawah setelah Vietnam. Selain itu menurut Laporan *Indonesian Institute for Corporate Directionship* (IICD)

menyatakan belum ada perusahaan Indonesia yang masuk kelompok 50 besar perusahaan dengan *corporate governance* terbaik ASEAN (Primus, 2017).

Menurut Cinantya dan Merkusiwati (2015), perusahaan seharusnya juga menerapkan *good corporate governance* yang baik. *Good corporate governance* yang baik membuka peluang perusahaan mengalami kondisi sehat atau kondisi yang baik akan semakin besar. Tata kelola perusahaan yang baik memperbesar kemungkinan perusahaan pada kondisi sehat serta mampu bersaing di era globalisasi. Semakin kuatnya persaingan dunia usaha menuntut perusahaan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan sehat merupakan hasil interaksi manajemen dalam mengelola dana, *good corporate governance* dan lingkungan sekitar perusahaan.

*Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) dalam Iman dan Amin (2002:1), *corporate governance* adalah suatu struktur untuk menetapkan tujuan perusahaan, saran untuk mencapai tujuan tersebut serta menentukan pengawasan atas kinerja perusahaan. Bodroastuti dalam Wahyuningsih (2017) mengatakan bahwa mekanisme *corporate governance* dapat menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, sehingga konflik antara pihak *agent* dan *principal* yang berdampak pada *agency cost* dapat dihindari. Emirzon dalam Wahyuningsih (2017) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa *good corporate governance* terbukti dapat membantu perusahaan meningkatkan kinerjanya hingga 30%. Nuswandari (2009) menyimpulkan bahwa *corporate governance* yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan sehingga dapat memperkecil risiko perusahaan mengalami kondisi *financial distress*.

Rasio-rasio keuangan dan mekanisme *good corporate governance* yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *leverage*, profitabilitas, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional guna memprediksi kondisi *financial distress* pada perusahaan, informasi tersebut dapat dilihat dalam laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan.

*Leverage* yang diukur menggunakan *debt to asset ratio* (DAR) merupakan sumber dana eksternal karena mewakili hutang yang ada dalam suatu perusahaan (Mayangsari, 2015). Digunakannya rasio ini karena DAR lebih baik dalam

memperkirakan seberapa besar pengaruh utang terhadap kegiatan operasional perusahaan. Andre (2013) menyatakan terdapat hubungan positif antara *leverage* dengan *financial distress*, ini berarti bahwa *leverage* perusahaan yang tinggi akan mengakibatkan kondisi terjadinya *financial distress* akan semakin tinggi. Penelitian tersebut juga serupa dengan penelitian, Cinantya dan Merkusiwati (2015), Cahyani, dkk (2016), Kristanti *et. al*, dan Damayanti, dkk (2017). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *leverage* dapat mempengaruhi *financial distress*. Namun, penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Hadi (2014), Sunarwijaya (2016), dan Mayangsari (2015) yang menunjukkan *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *financial distress*. Penulis menggunakan *leverage* dalam penelitian ini karena masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian.

Menurut Wahyu (dalam Andre, 2013) profitabilitas yang diukur menggunakan *return on asset* menunjukkan efisiensi dan efektifitas penggunaan aset perusahaan karena rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan penggunaan aset. Digunakannya rasio ini karena ROA lebih sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan, serta lebih mudah untuk memproyeksikan perencanaan keuangan perusahaan. Yustika, dkk (2015) mengemukakan bahwa terdapat hubungan negatif antara profitabilitas dengan *financial distress*, yang berarti jika tingkat profitabilitas menurun maka kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress* akan meningkat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Andre (2013), Fadhilah dan Syafruddin (2013), dan Mayangsari (2015) berpendapat bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Namun Kusanti (2015) mengatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Dewan Komisaris Independen menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006:13) adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Proporsi dewan komisaris independen harus

sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen (Antonia dalam Ariesta dan Chariri, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah dan Syafruddin (2013) dan Fathonah (2016) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara dewan komisaris independen dengan *financial distress* yang menunjukkan bahwa semakin sedikit keberadaan komisaris independen maka semakin besar kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*. Pendapat tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Ananto, dkk (2017), Deviacita dan Achmad (2012), dan Sastriana dan Fuad (2013) yang menyebutkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kondisi *financial distress*. Penelitian Ariesta dan Chariri (2013) mengatakan bahwa dewan komisaris independent memiliki pengaruh yang positif terhadap *financial distress* yang berarti bahwa jumlah yang semakin banyak dari dewan komisaris independen akan menyebabkan kemungkinan *financial distress* juga semakin meningkat. Hal tersebut bertentangan dengan *agency theory* yang menjelaskan bahwa semakin besar jumlah komisaris independen pada dewan komisaris, maka semakin baik mereka bisa memenuhi peran mereka di dalam mengawasi dan mengontrol direktur eksekutif untuk tidak melakukan tindakan oportunistik, dan dapat menjauhkan perusahaan *financial distress*.

Kepemilikan Manajerial menurut Hadi (2014) adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen atau pengelola perusahaan tersebut. Kepemilikan ini menunjukkan adanya peran ganda seorang manajer, yakni manajer bertindak juga sebagai pemegang saham. Sebagai seorang manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham tidak ingin perusahaan dalam keadaan kesulitan keuangan bahkan mengalami bangkrut. Penelitian yang telah dilakukan oleh Fadhilah dan Syafruddin (2013) dan Deviacita dan Achmad (2012) mengatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif yang artinya semakin tinggi kepemilikan manajerial maka semakin kecil kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian Cinantya dan Merkusiwati (2015), Mayangsari (2015), dan Kusanti (2015) yang mengatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Kepemilikan Institusional menurut Fathonah (2016) Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Hal ini dikarenakan kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan manajemen, sehingga dengan kepemilikan institusional biaya agensi dapat diminimalkan. Nilai perusahaan juga akan meningkat jika institusi mampu menjadi alat monitoring yang efektif. Crutchly *et al.* dalam Fathonah (2016) menyatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin kuat kontrol eksternal terhadap perusahaan dan hal ini dapat mengurangi biaya keagenan. Hal tersebut konsisten dengan hasil penelitian Cinantya dan Merkusiwati (2015), Fathonah (2016), dan Deviacita dan Achmad (2012) yang mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *financial distress*. Namun ada yang berpendapat bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *financial distress* yaitu Ananto, dkk (2017), Sastriana dan Fuad (2013), dan Widyasaputri (2012).

Berdasarkan penjelasan di atas, mengenai fenomena dan adanya inkonsistensi pada penelitian sebelumnya maka, penulis tertarik meneliti mengenai **“Pengaruh Leverage, Profitabilitas, dan Good Corporate Governance terhadap Financial distress (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016).**

### **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas tentang hubungan antara *leverage*, profitabilitas, dan *good corporate governance* terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress*, membuat hal ini menarik untuk diteliti. Dengan adanya masalah praktik tata kelola perusahaan di Indonesia yang cenderung masih belum baik, dan juga penurunan laba bahkan kerugian pada perusahaan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

*Financial distress* merupakan penurunan kinerja keuangan sebelum terjadi kebangkrutan. Kesulitan keuangan berkisar dari kesulitan likuiditas (jangka pendek) sampai kebangkrutan (jangka panjang). Analisis *financial distress* penting untuk dilakukan agar *stakeholders* bisa membuat keputusan yang tepat demi

kelangsungan perusahaan agar tidak mengalami kebangkrutan. Semakin awal ditemukannya indikasi kebangkrutan, semakin baik bagi pihak manajemen karena pihak manajemen dapat melakukan kegiatan yang bersifat korektif seperti perbaikan dan evaluasi agar kebangkrutan tersebut tidak benar-benar terjadi pada perusahaan.

Kesulitan keuangan yang terjadi pada perusahaan sektor pertambangan dalam beberapa tahun terakhir, membuat perusahaan selalu mencari cara agar kondisi yang paling dihindari perusahaan yaitu kebangkrutan, tidak terjadi pada perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan dan juga dilihat dari tata kelola perusahaan yang baik agar kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat dihindari.

#### **1.4 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *leverage (debt to asset ratio)*, profitabilitas (*return on asset*), dan *good corporate governance* (dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional) dan prediksi *financial distress* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016?
2. Apakah *leverage (debt to asset ratio)*, profitabilitas (*return on asset*), dan *good corporate governance* (dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional) berpengaruh secara simultan terhadap *financial distress* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016?
3. Apakah *leverage (debt to asset ratio)* berpengaruh secara parsial terhadap *financial distress* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016?
4. Apakah profitabilitas (*return on asset*) berpengaruh secara parsial terhadap *financial distress* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016?

5. Apakah *good corporate governance* berpengaruh secara parsial terhadap *financial distress* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016?
  - a. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh secara parsial terhadap *financial distress* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016?
  - b. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh secara parsial terhadap *financial distress* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016?
  - c. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh secara parsial terhadap *financial distress* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana *leverage*, (*debt to asset ratio*), profitabilitas (*return on asset*), dan *good corporate governance* (dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional) dan *financial distress* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan *leverage*, (*debt to asset ratio*), profitabilitas (*return on asset*), dan *good corporate governance* (dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional) terhadap *financial distress* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *leverage* (*debt to asset ratio*) terhadap *financial distress* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial profitabilitas (*return on asset*) terhadap *financial distress* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016.

5. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *good corporate governance* terhadap *financial distress* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016.
  - a. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial proporsi dewan komisaris independen terhadap *financial distress* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016.
  - b. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kepemilikan manajerial terhadap *financial distress* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016.
  - c. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kepemilikan institusional terhadap *financial distress* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Aspek Teoritis**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang sejauh mana *leverage*, profitabilitas, dan *good corporate governance* dapat memprediksi kondisi *financial distress* perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. Selain itu, juga memberikan kontribusi sebagai bahan referensi untuk penelitian sejenis.

### **1.6.2 Aspek Praktis**

1. Bagi perusahaan (manajemen), dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui langkah dalam melakukan analisis mengenai kondisi kinerja keuangan dan juga kesehatan perusahaan lebih baik sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pihak manajemen.
2. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai sejauh mana profitabilitas, *leverage*, dan *good corporate governance* dapat memprediksi kondisi *financial distress* perusahaan pertambangan yang dapat mempengaruhi keputusan investasi.

## **1.7 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini terdiri atas lima variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah profitabilitas, *leverage*, dan *corporate governance* yang mencakup dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah *financial distress*. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode 2012-2016 menjadi objek penelitian. Penelitian ini merupakan prediksi *financial distress* yang merupakan tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder atau data yang sudah dipublikasikan yang berasal dari Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016, laporan keuangan perusahaan (*annual report*).

## **1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN**

Bab ini berisi rangkuman teori, kajian pustaka, lingkup penelitian dan juga interpretasi yang berhubungan atau terkait dengan variabel penelitian, juga berisi kerangka pemikiran serta perumusan hipotesis serta penelitian terdahulu yang menjadi acuan.

### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menegaskan mengenai pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data yang dapat menjawab dan menjabarkan masalah penelitian.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil dari analisis data yang diuraikan secara kronologis serta pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan yang menjawab tujuan penelitian dan saran yang akan diberikan sebagai perbaikan bagi penelitian selanjutnya.

